

## ABSTRACT

**Aura Haradhilla, NRM. 21.03.049. *The Role of the Brebes Police Women and Children's Service Unit (PPA) in Handling Physical Violence Against Women in Brebes Regency. Supervised by DECKY IRIANTI and HELLY OCKTILIA***

*Physical violence against women remains a serious issue in Indonesia, including in Brebes Regency. The Women and Children Service Unit (PPA) of the Brebes Police plays a crucial role in providing protection and legal enforcement for victims of physical violence. This study examines the role of the PPA Unit of the Brebes Police in handling physical violence against women, referring to Perkapolri No. 10 of 2007, which establishes two main duties for the PPA Unit: victim protection and legal enforcement against perpetrators. The research method used is qualitative with a case study approach through in-depth interviews, observation, and document study involving four informants, consisting of three from the Unit PPA and one from the Social Service Office. The results show that the PPA Unit has provided psychological and legal assistance, protected the victims' identities, and facilitated safe houses in collaboration with the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3KB). However, the unit still faces challenges such as limited human resources, dependence on DP3KB facilities, and a lack of structured recovery programs. In terms of law enforcement, the investigation process includes medical examinations, witness interrogations, and intersectoral coordination, with the application of restorative justice in non-severe cases. Nevertheless, case resolution is often hampered by the high rate of report withdrawal by victims due to psychological and economic pressures, as well as the limited number of accompanying psychologists. To address these obstacles, the study proposes the "Recovery and Empowerment Program in Safe Houses (PKRA)" based on social workers to strengthen victim recovery through psychosocial support, skills training, and social reintegration, emphasizing inter-agency collaboration and prevention of repeated violence. Thus, the PPA Unit plays a significant role in victim protection and law enforcement, but requires strengthening of human resources, independent infrastructure, and integration of social workers' roles to optimize services.*

**Keywords:** *Physical violence against women, PPA Unit, victim protection, law enforcement.*

## ABSTRAK

**Aura Haradhilla, NRM. 21.03.049. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dalam Menangani Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan di Kabupaten Brebes. Dibimbing oleh DECKY IRIANTI dan HELLY OCKTILIA**

Kekerasan fisik terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Brebes. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan fisik. Penelitian ini mengkaji peran Unit PPA Polres Brebes dalam menangani kekerasan fisik terhadap perempuan, dengan mengacu pada Perkapolri No. 10 Tahun 2007 yang menetapkan dua tugas utama Unit PPA, yaitu perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan yang terdiri dari tiga informan dari Unit PPA dan satu informan dari Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah memberikan pendampingan psikologis dan hukum, perlindungan identitas korban, serta memfasilitasi rumah aman bekerja sama dengan DP3KB, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada fasilitas DP3KB, dan minimnya program pemulihan terstruktur. Dalam aspek penegakan hukum, proses penyidikan melibatkan visum, pemeriksaan saksi, dan koordinasi lintas sektor, serta penerapan *restorative justice* dilakukan bukan untuk kasus berat. Namun, penyelesaian kasus sering terhambat oleh tingginya pencabutan laporan oleh korban akibat tekanan psikologis dan ekonomi, serta keterbatasan jumlah psikolog pendamping. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diusulkan program “Program Pemulihan & Kemandirian di Rumah Aman (PKRA)” berbasis pekerja sosial guna memperkuat pemulihan korban melalui dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial yang menekankan kolaborasi antarlembaga serta pencegahan kekerasan berulang. Dengan demikian, Unit PPA berperan signifikan dalam perlindungan korban dan penegakan hukum, namun memerlukan penguatan sumber daya manusia, infrastruktur mandiri, dan integrasi peran pekerja sosial untuk optimalisasi layanan.

**Kata Kunci: Kekerasan fisik terhadap perempuan, Unit PPA, perlindungan korban, penegakan hukum.**